



Tumbuh  
Indonesia bersama

BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga  
melayani  
bangsa

# ARAH KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 2027

**Ir. Medrilzam, MPE, PhD**  
**Deputi Pembangunan Kewilayahan**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

**Banda Aceh, 23 April 2026**

Disampaikan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Aceh 2026





# PEMBANGUNAN DI TAHUN 2027 DIHADAPKAN PADA BERBAGAI TANTANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK

## Tantangan Global 2027



**Adanya ketidakpastian kebijakan perdagangan** akibat adanya kebijakan tarif & pembatasan perdagangan



**Dinamika ketegangan geopolitik serta geoekonomi** yang berpotensi mengganggu stabilitas global



**Risiko utang global yang tinggi dan defisit fiskal lebih lebar** karena adanya pengetatan kondisi keuangan global



**Ketimpangan teknologi dan disrupsi AI** yang dapat meningkatkan kesenjangan antar negara



**Perubahan iklim ditandai dengan peningkatan suhu global** berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan

*Sumber: OECD, WEF, World Bank, dan IMF*

## Tantangan Domestik 2027



**Meningkatnya utang publik dan swasta yang jatuh tempo & dapat menekan ruang fiskal dan memperlebar defisit**



**Produktivitas dan kesejahteraan pekerja masih rendah & dapat menghambat penguatan konsumsi domestik**



**Overregulasi dan proses perizinan masih cenderung kompleks** yang menghambat arus investasi



**Ketergantungan ekspor komoditas bernilai rendah** yang meningkatkan kerentanan terhadap gejolak harga global



**Adopsi teknologi dan digitalisasi belum merata** dapat memperlambat transformasi digital & menurunkan daya saing

*Sumber: OECD, World Bank, dan Kompas.com*



# RENCANA PEMBANGUNAN DI TAHUN 2027 DITUANGKAN DALAM TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2027



## Tema Ranwal RKP 2027: “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”

### Produktivitas

#### Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Inovasi

- Makan Bergizi Gratis ★
- Revitalisasi Sekolah ★
- Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul ★
- Layanan Berkualitas dan Akses Kesehatan Gratis ★
- Digitalisasi Pendidikan ★
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

#### Stimulus untuk Produktivitas & Daya Beli Masyarakat

- Kartu Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Nasional ★
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ★
- Pembiayaan Perumahan dan Penanganan Pemukiman Kumuh (Gentengisasi)
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

#### Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola

- Satu Data Sosial Ekonomi (DTSEN)
- Layanan Digital Optimal dan Terintegrasi di Sektor Strategis
- Pemerintahan Digital yang Merata
- Tanggap Darurat Bencana

#### Regulasi dan Kelembagaan

- Diplomasi Tangguh (Perlindungan, Ekonomi, Budaya, Kepemimpinan, Pertahanan dan Kedaulatan)
- Integritas Tata Kelola Pemerintah



### Investasi

#### Efisiensi dan Efektivitas Investasi

- Pengelolaan Sampah (Instalasi PSEL) ★
- Investasi Hijau Berkelanjutan
- Kemudahan Perizinan

#### Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi

- Infrastruktur Dasar
- Konektivitas Logistik
- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

#### Inovasi Pembiayaan Pembangunan

- Optimalisasi Danantara dan Peran BUMN
- Pembiayaan Pembangunan Berbasis Kovensional dan Syariah

#### Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor

- Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus
- Destinasi Pariwisata Prioritas



### Industri

#### Industri Nasional

- Industri Besar Strategis Nasional
- Pengembangan Mobil Nasional ★
- Pengelolaan Sampah ★

#### Hilirisasi SDA Strategis

- Hilirisasi Kelautan dan Perikanan (Pengembangan Industri Garam dan Produk Hasil Laut) ★
- Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan (Hilirisasi Kelapa Sawit) ★
- Hilirisasi Mineral dan Migas ★

#### Swasembada Pangan, Energi, dan Air

- Swasembada Pangan (KSPP) ★
- Swasembada Energi ★
- Swasembada Air (*Giant Sea Wall*) ★

★ Keterangan: Direktif Presiden





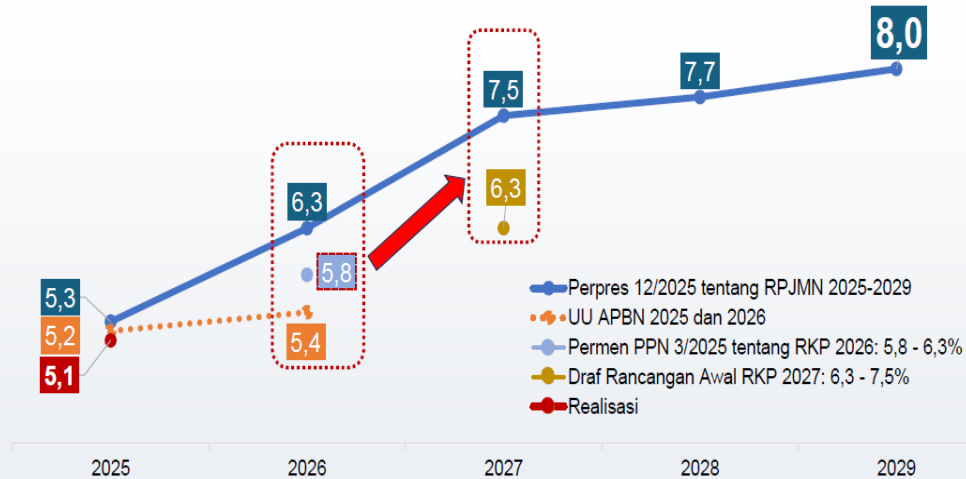
# SASARAN RKP 2027 MERUPAKAN FASE AKSELERASI PERTUMBUHAN MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI 8%



**Target RKP 2027**  
berada pada fase  
akselerasi  
pertumbuhan sebagai  
jembatan menuju 8%  
pada 2029 sesuai  
RPJMN 2025-2029



## SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2025-2029 (dalam persen)



Sumber : Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029; UU APBN 2025 dan 2026; Permen PPN 3/2025 tentang RKP 2026.

## PERTUMBUHAN TINGGI BERKELANJUTAN

	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	5,4	6,3 – 7,5
GNI per Capita (US\$)	5.220 (outlook)	5.520	5.980–6.050
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	43,72 (2024)	37,14	39,57
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,53 (2024)	76,67	76,84

## PENURUNAN KEMISKINAN

	2025	2026	2027
Tingkat Kemiskinan (%)	8,25	6,5 – 7,5	6,0 – 6,5
Kemiskinan Ekstrem (%)	0,85	0,0-0,5	0
Rasio Gini	0,363	0,377-0,380	0,375-0,378
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,74	4,44-4,96	4,30 – 4,87

## SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS

	2025	2026	2027
Indeks Modal Manusia	0,54 (2023)	0,57	0,58

## INDIKATOR PEMBANGUNAN 2027

	2025	2026	2027
Indeks Kesejahteraan Petani	0,6930 (2023)	0,7731	0,8038
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	24,50	35,00	40,81

Keterangan: Perpres 12/2025 RPJMN 2025-2029, Rperpres RKP 2026, dalam proses exercise Bappenas November 2025



# TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN SASARAN MAKRO PROVINSI ACEH

## SASARAN PERTUMBUHAN NASIONAL

6,3 – 7,5 (persen)

Sisi Produksi	Pertumbuhan 2027	Pertumbuhan 2027	Sisi Pengeluaran
Pertanian	5,2 – 5,9	5,7 – 6,4	Konsumsi Masyarakat
Pertambangan	1,0 – 1,1	7,5 – 15,9	Konsumsi Pemerintah
Industri Pengolahan	6,4 – 7,5	8,0 – 8,3	PMTB/Investasi
Konstruksi	5,4 – 5,7	7,2 – 8,5	Ekspor Barang & Jasa
Perdagangan	6,1 – 6,5	8,5 – 9,4	Impor Barang & Jasa
Penyediaan Akommin	8,7 – 9,3		
Transportasi & Pergudangan	10,6 – 12,6		
Informasi & Komunikasi	9,7 – 11,6		

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2027

Sumber : Draft Ranwal RKP 2027

*Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 6,3 – 7,5 % di 2027, Aceh perlu tumbuh sebesar 3,8 – 4,1 %, dengan diikuti perbaikan pada indikator makro lainnya*

## SASARAN MAKRO ACEH

### Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan

2027

Pertumbuhan Ekonomi (%)

3,8 – 4,1

### Penurunan Kemiskinan

2027

Tingkat Kemiskinan (%)

12,22 – 13,60

Rasio Gini

0,274 – 0,284

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4,45 – 5,50

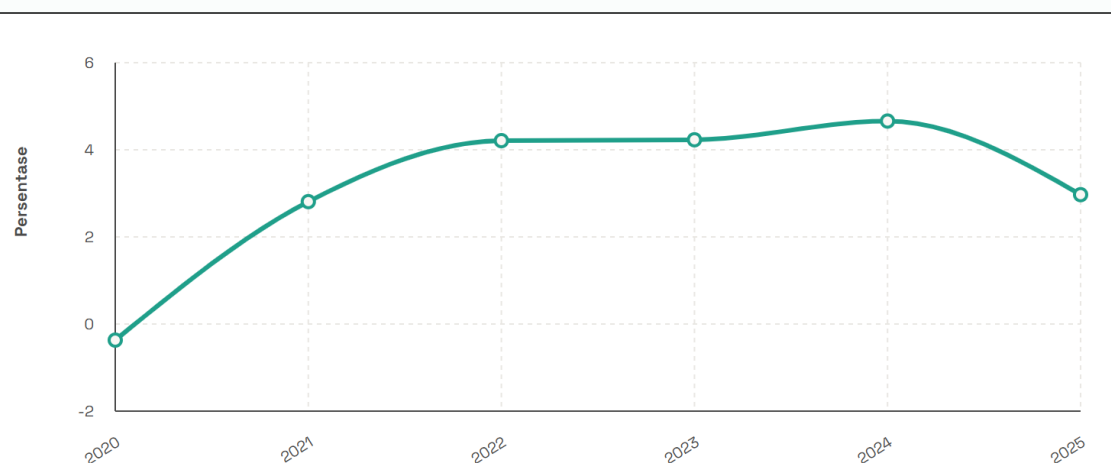
### Sumber Daya Manusia Berkualitas

2027

Indeks Modal Manusia

0,59

Pertumbuhan Ekonomi Aceh (YoY)





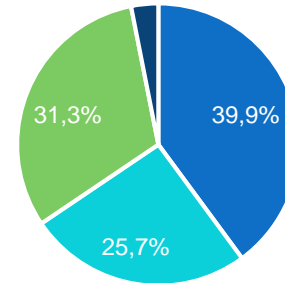
# DUKUNGAN PROVINSI ACEH DALAM RKP 2027: INVESTASI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Keterbatasan konektivitas wilayah di Aceh masih menjadi tantangan dalam mendukung pemerataan pembangunan dan akses layanan dasar, serta investasi.

## Highlight Intervensi Kebijakan

1. **Penguatan infrastruktur konektivitas** dan pemenuhan layanan dasar melalui :
  - a. Percepatan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, **khususnya pembangunan pada sektor perumahan dan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, dan listrik).**
  - b. **Preservasi jalan ruas Lhokseumawe–Redelong–Takengon dan Takengon–Blangkejeren**, sebagai penghubung utama pertumbuhan Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar.
  - c. **Penuntasan jalan Tol Binjai – Langsa** untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempermudah distribusi komoditas unggulan Aceh.
2. **Percepatan peningkatan infrastruktur berketahanan dan berbasis *nature-based solution*** untuk memitigasi dampak dari bencana alam.
3. **Percepatan transisi dan energi hijau** melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan.

■ Baik  
■ Sedang  
■ Rusak  
■ Belum Tembus



**10 Bandara**



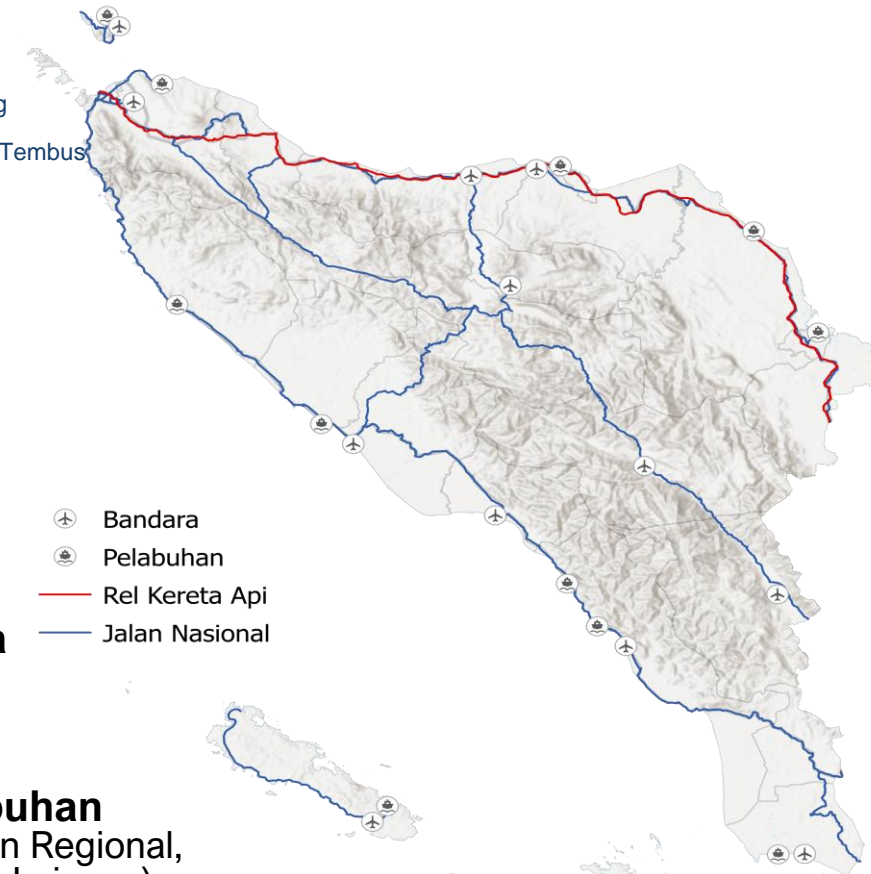
**15 Pelabuhan**  
(Pelabuhan Regional, Lokal, dan Lainnya)



Panjang jalan  
Provinsi Aceh  
**1.897,91 Km**



**Kemantapan jalan 84,41 %**, Panjang Jalan dengan kondisi **Mantap 1.503.93 Km** dan kondisi **tidak mantap** sepanjang **277, 79 Km**



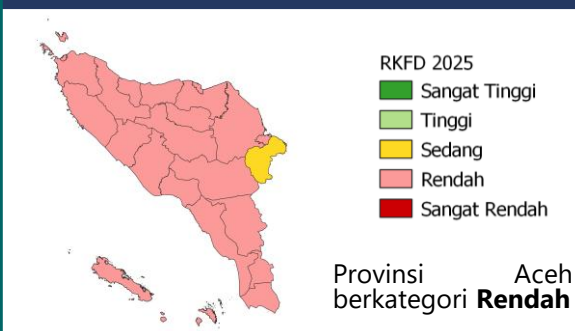
## Kemandirian fiskal daerah Provinsi Aceh dan Kab/Kota relatif rendah, walaupun mengalami kenaikan di TA 2026

% PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2025		2026	
	Provinsi	Kab/Kota	Provinsi	Kab/Kota
	26,48%	12,55%	39,79%	13,34%

## Belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin, khususnya belanja pegawai yang mengalami kenaikan di TA 2026

% BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH	2025		2026	
	Provinsi	Kab/Kota	Provinsi	Kab/Kota
	33,44%	41,00%	36,66%	43,95%

## RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH (RKFD) TAHUN 2025



Kab/Kota di Aceh:  
**Rendah:** 5 Kota dan 17 Kab, **Sedang:** 1 Kab

Sumber: PMK No. 97 Tahun 2025

## Strategi Penguatan Fondasi Keuangan Daerah

### 1 OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

- **pemetaan dan pemutakhiran basis data potensi pajak dan retribusi.**
- **sinergi Provinsi dan Kab/Kota** dalam implementasi Opsen PKB dan BBNKB, maupun MBLB.
- **tata kelola dan profitabilitas BUMD** serta optimalisasi pemanfaatan BMD.
- **digitalisasi dan penerapan sistem cashless.**

### 2 PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DAERAH

- **pemenuhan belanja mandatory** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menggeser belanja yang **bersifat rutin menuju belanja produktif** dan berdampak langsung pada masyarakat.
- Memperkuat **pengawasan realisasi APBD** agar tidak menumpuk di akhir tahun serta penggunaan SIPD.

### 3 INOVASI PENDANAAN PEMBANGUNAN

- **sinergi pendanaan** antara APBN, APBD, dan sumber non-APBN/APBD sesuai amanat UU HKPD.
- **pemanfaatan pendanaan alternatif** seperti KPB, pinjaman daerah, LVC, obligasi/sukuk daerah, dana abadi daerah, serta skema pembiayaan lainnya
- Mengurangi **dana mengendap (idle cash)** dan memanfaatkan SiLPA secara lebih produktif.

## Realisasi pendapatan dan belanja TA 2025, baik Provinsi dan Kab/Kota, belum optimal Diperlukan percepatan realisasi pendapatan dan belanja TA 2026 yang memiliki daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi daerah

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2025	PENDAPATAN		BELANJA	
	Provinsi	Kab/Kota	Provinsi	Kab/Kota
	94,59%	84,92%	89,04%	82,01%
	Rp. 10,2 Triliun	Rp. 24,7 Triliun	Rp.9,8 Triliun	Rp.24,6 Triliun

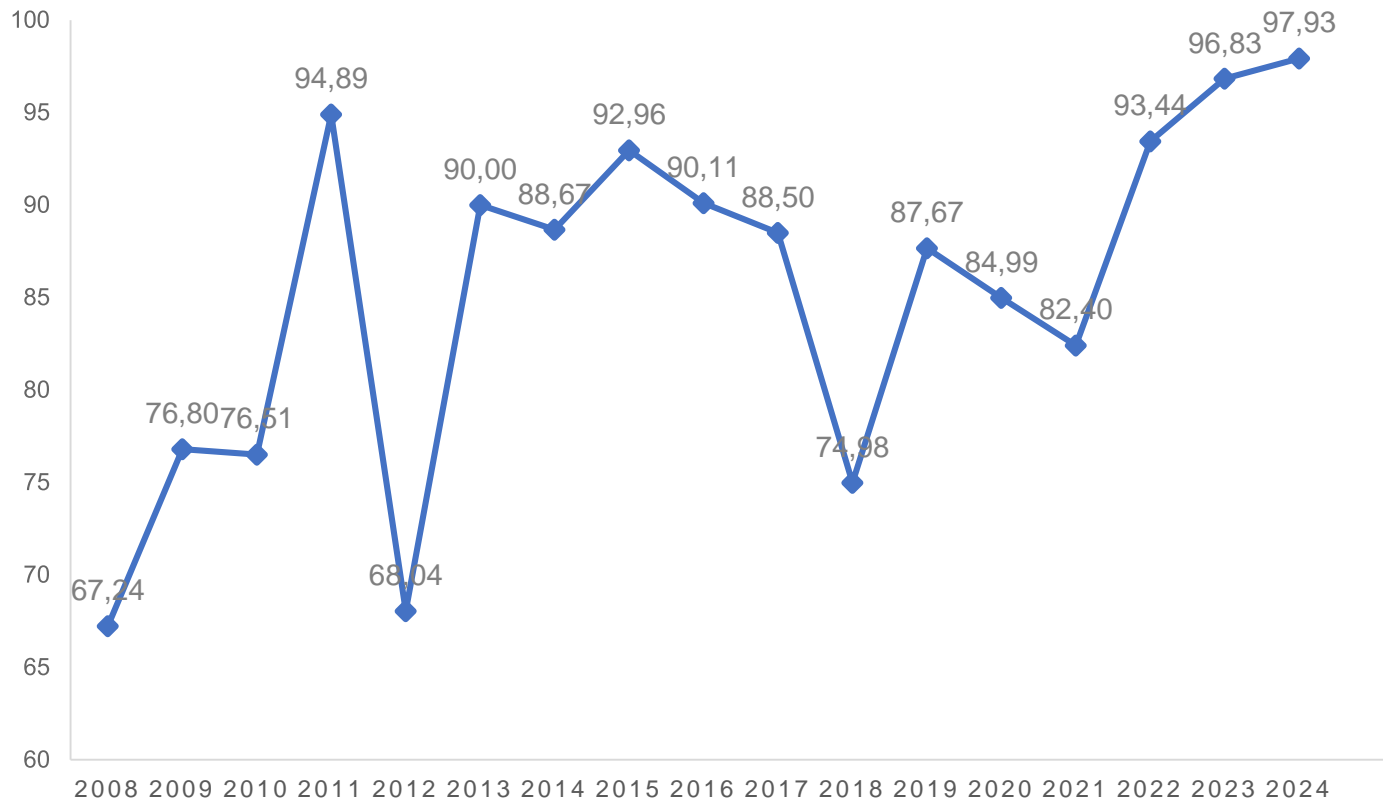
Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2025, - data diterima SIKD per 19 April 2026

Sumber: Data APBD Anggaran Provinsi Aceh, SIKD Kemenkeu, 2025-2026 diolah;

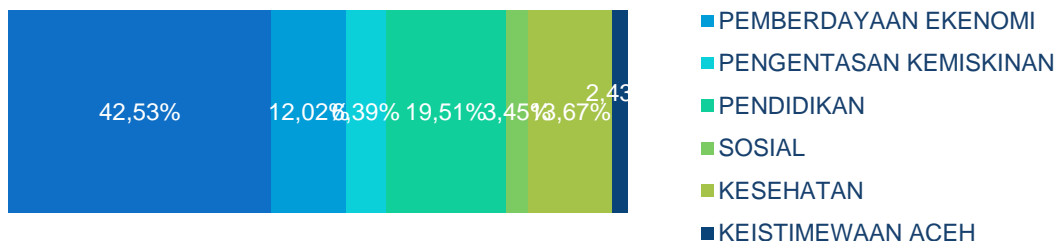


# KINERJA REALISASI DANA OTSUS TAHUN 2008-2024

## Tren Realisasi Otsus Aceh 2008 – 2024 (Persentase)



## Rata-Rata Proporsi Penggunaan Dana Otsus Per Bidang (%)



1. Rata-rata penyerapan anggaran tahun 2008 s.d 2021 **hanya 82,4 %**:
  - a. SiLPA 4 (empat) tahun 2018 – 2021 selalu mencapai diatas **Rp. 1 Triliun**, terutama untuk bidang infrastruktur, bidang pendidikan, dan bidang pengentasan kemiskinan.
  - b. SiLPA disebabkan **keterlambatan penyampaian dokumen penyaluran** setiap tahun.
2. Dalam tiga tahun terakhir, seiring dengan mulai berlakuknya Pasal 183 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 dan dilakukan perbaikan tata kelola, rata-rata kinerja realisasi penyerapan diangka **96,07 %**.

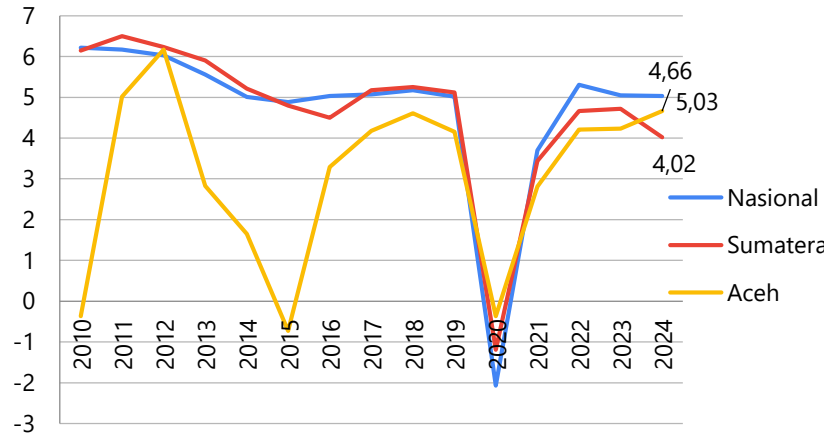


# DAMPAK DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAERAH (2010-2024)

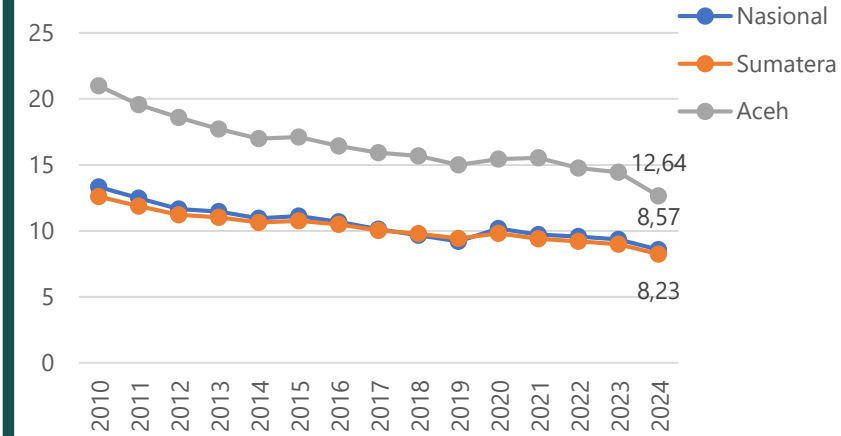


- **Pertumbuhan ekonomi Aceh selama alokasi Dana Otsus cenderung fluktuatif, sedangkan tingkat kemiskinan dan pengangguran terus menurun** Namun, capaian angka kemiskinan dan pengangguran masih di bawah rata-rata Pulau Sumatra & nasional.
- **Capaian IPM Aceh juga terus meningkat, di atas capaian rata-rata Pulau Sumatra, namun masih di bawah rata-rata nasional.**

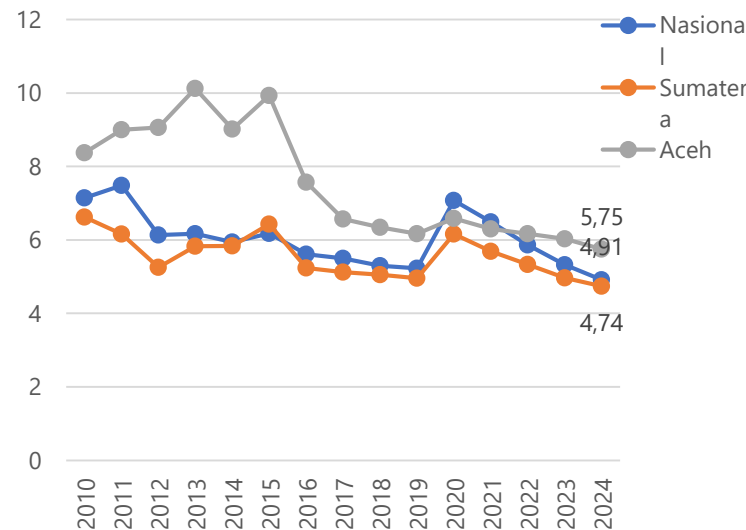
### Laju Pertumbuhan Ekonomi



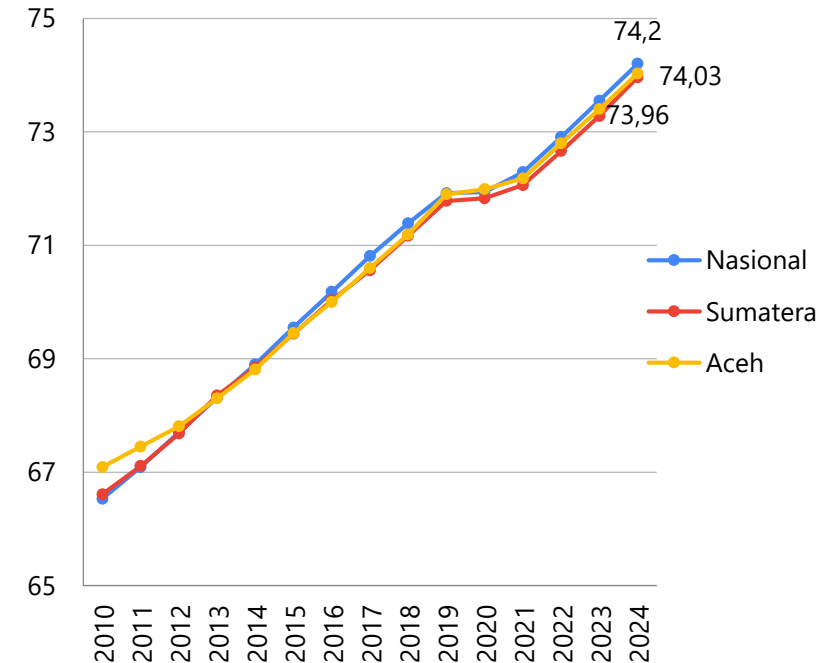
### Angka Kemiskinan



### Tingkat Pengangguran Terbuka



### Indeks Pembangunan Manusia



## Respons Kebijakan

- **Percepatan eksploitasi blok migas di Selat Malaka.**
- **Revitalisasi KEK Arun** melalui hilirisasi migas dan CCS.
- **Revitalisasi KPBPB Sabang** yang berdaya saing dan *globally connected*.
- **Pengembangan kepariwisataan berkualitas di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar.**
- **Peningkatan produktivitas perikanan tangkap, kopi Gayo, dan komoditas agrikultur** (padi, cokelat, kelapa, dan hortikultura).



# PROSES PEMUTAKHIRAN RENDUK PRRP SUMATERA

## Versi Pertama menjadi Versi Final

### METODOLOGI PENYUSUNAN RENDUK PRRP SUMATERA

#### Kebutuhan (Demand)

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari 53 Kabupaten/Kota (SK Masing-masing Gubernur)

#### Respon (Supply)

Rencana Aksi PRRP dari 32 Kementerian/Lembaga untuk pembiayaan APBN sectoral

### BAPPENAS: Penyelarasan dan Penelaahan

#### Kriteria penyelarasan renaksi K/L dan JITUPASNA

- 1 Rencana aksi K/L sesuai dengan kebutuhan JITUPASNA dalam hal volume, lokasi, dan <sup>+</sup>angka kebutuhan
- 2 Rencana aksi K/L sesuai dengan kebutuhan JITUPASNA namun belum sesuai dalam hal volume, lokasi, dan angka kebutuhan
- 3 Rencana aksi K/L ada tapi tidak terdapat pada kebutuhan JITUPASNA
- 4 Rencana aksi K/L tidak ada namun terdapat kebutuhan JITUPASNA yang merupakan kewenangan daerah

### PEMUTAKHIRAN VERSI PERTAMA MENJADI VERSI FINAL

Renduk PRRP Sumatera dan Renduk PRRP Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) versi final memuat Renaksi K/L yang sudah dimutakhirkan melalui forum pendampingan bersama 53 Pemda Kab/Kota terdampak, yang diselenggarakan pada 9-11 Maret 2026, dan telah dilaporkan kepada Satgas pada 31 Maret 2026

#### Waktu Pelaksanaan:

Tiga (3) tahun pelaksanaan mulai dari 2026, 2027 dan 2028. Tidak termasuk fase darurat dan transisi, dan hanya dialokasikan untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (dengan prinsip *Build Back Better, Safer dan Sustainable*).

### Tahapan Penanganan Pascabencana Sumatera:





# REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH PENAJAMAN KEBUTUHAN INDIKATIF PENDANAAN RENAKSI K/L

## Kebutuhan (*Demand*)

Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 18 Kabupaten/Kota (SK Gubernur):  
**97.075\*** Kegiatan,  
**Rp. 153,24 Triliun**

\* estimasi jumlah kegiatan

## PENELAAHAN & PENYELARASAN

BAPPENAS

Kategori:

1 2 3

## Respon (*Supply*)

Rencana Aksi PRRP dari 23 K/L  
Usulan Awal: **6.042 kegiatan, Rp 60,07 Triliun**  
Setelah Penyelarasan: **7.163 kegiatan, Rp. 58,99 Triliun**

**(38,5 % dari total kebutuhan Jitupasna Aceh sebesar Rp153,2 triliun)**

No.	Sektor Pemulihan	Kebutuhan Jitupasna	Renaksi Aceh		Persentase dibanding Jitupasna
			Jumlah Kegiatan	Anggaran Rp	
1.	Permukiman	17.307.215.232.102	53	6.047.754.334.000	34,94%
2.	Infrastruktur	94.981.444.404.269	619	32.973.646.624.182	34,72%
3.	Ekonomi	18.031.229.754.918	1.381	5.319.827.208.584	29,50%
4.	Sosial	8.519.758.703.636	4.980	14.357.920.025.014	168,52%
5.	Lintas Sektor	14.409.222.292.983	130	299.216.395.179	2,08%
<b>Total</b>		<b>153.248.870.387.909</b>	<b>7.163</b>	<b>58.998.364.586.959</b>	<b>38,50%</b>

### Catatan:

Rinduk Aceh Versi 1 (Kategori 1 dan 2) : **49.824 Kegiatan, Rp. 45,834 Triliun** (29,91% dari kebutuhan Jitupasna Aceh)

Kategori 4 Kewenangan Daerah\*):  
**1.054 Kegiatan, Rp 5,292 Triliun**

\*) Mekanisme penyaluran: **50% APBD Provinsi, 30% APBD Kab./Kota, 20% TKD**



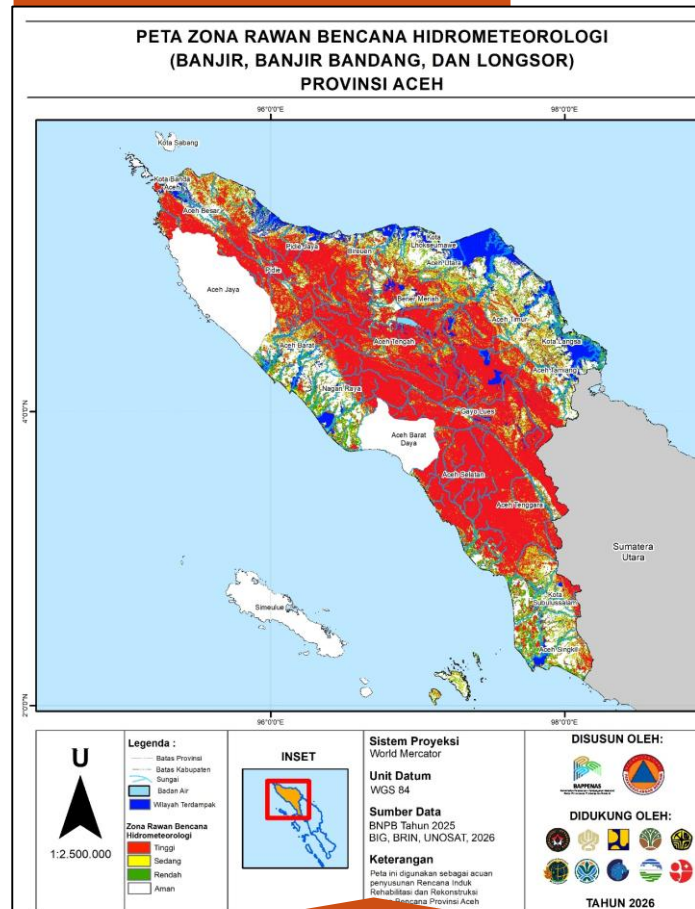
# PENETAPAN ZONA RAWAN BAHAYA

## TIPOLOGI DAN KRITERIA PENETAPAN ZONA RAWAN BENCANA PROVINSI ACEH

Zona	Tipologi dan Kriteria	Arahan Pemanfaatan Ruang
ZRB 4 - TINGGI	<p><b>Prohibited Zone (Tinggi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zona rawan banjir bandang (Aliran deras, Jalur Material)</li> <li>Sempadan sungai kritis (Erosi, Penyempitan sungai)</li> <li>Zona rawan longsor sangat tinggi (Lereng curam)</li> <li>Zona <i>runout</i> (Lintasan material menuju permukiman)</li> </ol>	<p><b>Area Terdampak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan <i>grey infrastructure</i> mitigasi banjir</li> <li>Normalisasi dan pengerukan sungai</li> <li>Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air</li> </ol> <p><b>Area Tidak Terdampak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan <i>zoning</i> untuk pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>Program relokasi ke zona aman berdasarkan ZRB</li> <li>Pemasangan sistem peringatan dini terintegrasi + rencana evakuasi</li> </ol>
ZRB 3 - SEDANG	<p><b>Restricted Zone (Sedang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zona rawan banjir bandang (Aliran deras, Jalur Material)</li> <li>Zona rawan longsor sedang-tinggi (Rawan saat hujan ekstrem)</li> <li>Tutupan lahan tidak sesuai (Permukiman padat dekat sungai, lahan deforestasi)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan permukiman terbatas (desain bangunan adaptif banjir dan stabilitas lereng)</li> <li>Sistem drainase dan pengendalian limpasan</li> <li>Pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai standar yang berlaku</li> </ol>
ZRB 2 - RENDAH	<p><b>Control Led Zone (Rendah)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zona rawan banjir bandang sedang</li> <li>Zona rawan longsor rendah-sedang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan diarahkan untuk fungsi adaptif terhadap air</li> <li>Melakukan pemeliharaan DAS</li> <li>Huntau dan huntara rekolasi dapat dibangun di ZRB 1 asalkan tidak berada di kawasan hutan dan memenuhi standar aman bencana</li> </ol>
ZRB 1 - TIDAK RAWAN	<p><b>Promoted Zone (Aman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zona aman banjir (Bukan <i>catchment area</i>)</li> <li>Zona aman longsor (Landai stabil)</li> <li>Zona prioritas untuk relokasi dari ZRB 3-4</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pusat rehabilitasi lokal (UMKM, pasar, dan layanan dasar)</li> <li>Menjadi zona prioritas utama pengembangan Huntau dan Huntara, selain kawasan hutan</li> <li>Peruntukan ruang sesuai RTRW/RDTR</li> </ol>

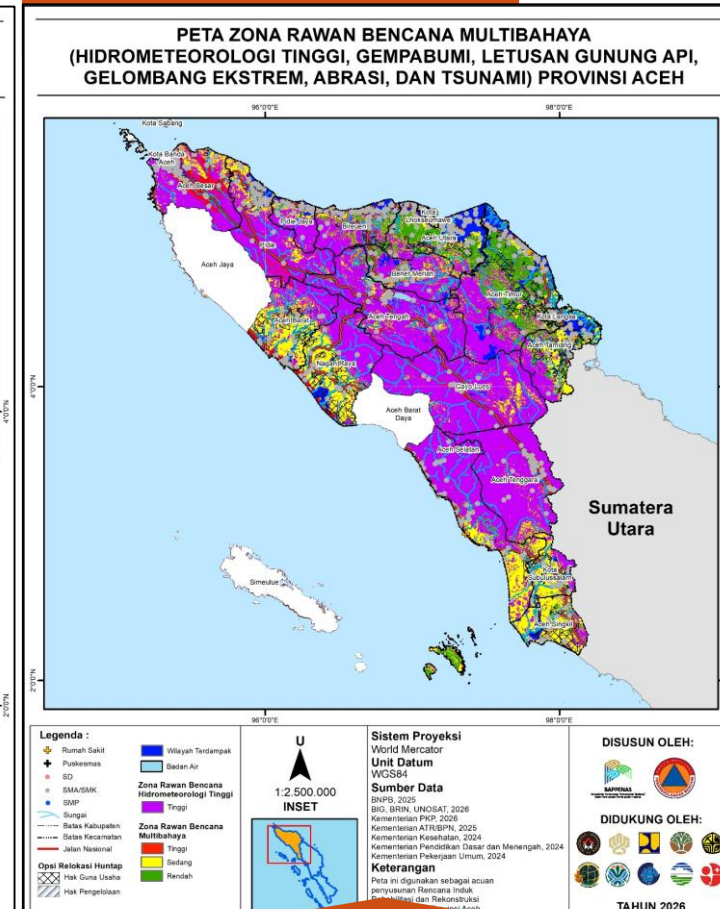
## PETA ZONA RAWAN BENCANA PROVINSI ACEH

### LEVEL 1



Peta Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi yang terdiri dari 4 kelas, yaitu Tinggi, Sedang, Rendah, dan Aman. Digunakan untuk melihat sebaran *no-go zone* dan *compromised areas*.

### LEVEL 2



Peta Zona Rawan Bencana Multibahaya. Digunakan untuk mengidentifikasi ancaman multi-bencana dan merumuskan kebijakan mitigasi bencana yang sesuai.

**1**

RKP 2027 agar menjadi dasar penyusunan program-program yang terukur & berdampak pada pembangunan dengan memperhatikan kaidah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial.

**2**

Peran aktif Pemda dalam (a) Melakukan **inventarisasi & mengawal pelaksanaan proyek/program prioritas nasional** berbasis kewilayahan & program prioritas daerah pengungkit pertumbuhan ekonomi. (b) **Meningkatkan pengendalian inflasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi**; serta (c) Memastikan adanya **sinergi perencanaan & pendanaan pusat - daerah**.

**3**

R3P Kabupaten/kota perlu di revisi mengacu kepada Renduk PRRP Provinsi Aceh yang menjadi kebijakan payung dan **pedoman bagi seluruh pihak, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan K/L** dalam melaksanakan rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana dalam kurun waktu 3 tahun (2026 – 2028).

**4**

Melakukan **penguatan koordinasi perencanaan & pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat - daerah**, termasuk membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, akademisi, & masyarakat sipil dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan, sekaligus percepatan proses rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana.



Tumbuh  
Indo bersama  
nesia

BerAKHLAK  
BerAKHLAK  
BerAKHLAK

#bangga  
melayani  
bangsa

# TERIMA KASIH.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

